

DIFABEL NEWS

BERGERAK MAJU BERSAMA MENUJU PERUBAHAN

Kemerdekaan Bagi Difabel....????



ma
na
cash



DIFABEL NEW'S

Diterbitkan oleh SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan,Difabel dan Anak)

Pimpinan Umum. Nurul Saadah Andiani,SH. **Pimpinan Redaksi** Totok Rawi Djati. **Dewan Redaksi.** Tari, Miko, Yuni, Purwanti, Edy Supriyanto, Widi Haryanti. **Sekertaris Redaksi.** Juju Juliati. **Redaktur Pelaksana.** Totok Rawi Djati, Tasik, Edy Subagiyo, Made, Edy Supriyanto. **Litbang** Nanang Hanif **Layout** Totok , Tasik. **Produksi/Sirkulasi.** Yuni, Purwanti.
Alamat Redaksi Komplek BNI No. 25 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta Telp 0274 384066

Kemerdekaan Untuk Siapa....????

Tanggal 17 Agustus merupakan Hari Kemerdekaan untuk Bangsa Indonesia yang kita cintai ini, karena tidak semua orang bisa menikmati hari kemerdekaan RI, apalagi untuk kawan-kawan difabel. Selama ini kawan-kawan difabel selalu mendapatkan perlakuan diskriminasi, baik di tingkat keluarga, masyarakat ataupun pemerintahan. Difabel di Indonesia sering kali diposisikan sebagai kelompok minoritas, baik secara struktur maupun kultur. Lebih dari itu, mereka juga merupakan kelompok yang selama ini terpinggirkan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Mereka terpinggirkan dalam berbagai dimensi mulai dari ekonomi, pendidikan, akses publik, akses pekerjaan, akses politik dan yang lainnya. Untuk itulah dalam momentum Hari Kemerdekaan yang ke 65 kali ini perlu dilakukan penyadaran kepada seluruh lapisan masyarakat baik dari pemangku kekuasaan, pemilik akses ekonomi hingga pengelola pendidikan untuk memiliki empati terhadap kalangan difabel. Masyarakat harus ditumbuhkan kepedulian terhadap hak-hak kaum difabel. Sebagai bukti masih rendah kepedulian mereka terhadap hak-hak para difabel, masih minimnya program-program maupun visi tentang keadilan difabel yang diangkat para politisi yang bertarung merebut kekuasaan. Padahal, dari tangan politisi inilah kebijakan pemerintah yang pro terhadap difabel dan prasarana yang akses terhadap difabel bisa terwujud. Para peminat kekuasaan itu baru memberikan akomodasi terhadap difabel manakala muncul desakan-desakan dari masyarakat.

Selain itu Program yang tercipta tidak mereka rancang secara matang dalam program-program partai politik maupun program sejak para politisi tersebut bertarung berebut kekuasaan. Kepedulian terhadap kaum difabel bukan berarti kita harus berbelas kasih. Bukan berarti kita menjadikan mereka sebagai lumbung kasihan. Tetapi, kepedulian terhadap kaum difabel adalah bagaimana kita bisa memberikan akses yang luas serta sebesar—besarnya dalam hidup bermasyarakat. Seperti yang disebut di atas tadi, harus diakui di Indonesia, kalangan difabel masih memiliki sejumlah kendala atau istilah ironisnya mereka belum merdeka. Padahal, kaum difabel juga ingin menikmati kemerdekaan dengan keterbatasan fisik yang dimilikinya. Kendala atau kemerdekaan yang belum diraih kaum difabel di Indonesia antara lain bisa diklasifikasikan sebagai berikut: pertama, kaum difabel di tanah air masih memiliki kendala di bidang kultural. Selama ini, mereka masih dikungkung oleh persepsi masyarakat terhadap status mereka. Masyarakat masih menganggap kaum cacat tersebut adalah orang yang lemah dan patut untuk disantuni dan dibelaskasihi dari orang-

Bahkan, harus diakui, alam sadar masyarakat masih banyak yang menganggap orang cacat sebagai orang yang berbeda dengan orang kebanyakan karena tubuh mereka tidak sesuai dengan standar fisik mayoritas orang. Persepsi semacam itu sudah harus dihapus dari kesadaran masyarakat. Karena persepsi yang salah akhirnya berdampak pada perlakuan yang salah terhadap kaum difabel. Selain soal kesalahan dalam persepsi, persoalan lain yang kini masih dihadapi kaum difabel di Indonesia adalah soal akses dalam fasilitas publik. Kalau kita runut, akses yang paling sederhana yakni fasilitas publik untuk kaum difabel saja masih banyak yang tidak memikirkannya. Masih banyak fasilitas publik yang tidak bersahabat bagi kaum penderita cacat fisik. Terbukti berbagai infrastruktur yang dibangun belum bisa diakses secara mudah bagi kaum difabel. Fasilitas/ruang publik seperti trotoar, terminal, kereta, tangga, jembatan penyeberangan, tempat ibadah, tempat pendidikan, tempat bisnis, mall dan yang lainnya sering tidak memperhitungkan akses buat kaum difabel. Ini bisa terjadi juga karena kesalahan persepsi. Faktor lain, bisa juga karena para pemilik atau penyedia fasilitas publik belum memperlakukan kaum difabel sebagai bagian dari masyarakat kita. Persoalan lain adalah lemahnya akses kaum difabel dalam berbagai bidang mulai Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Di sinilah dibutuhkan kebijakan pemerintah yang bisa mendorong terbukanya akses bagi kaum difabel. Memang, kalau kita tengok dalam regulasi yang dikeluarkan pemerintah ada aturan yang memberikan dukungan bagi kaum difabel. Yakni pasal 5 UU No 4 tahun 1997 yang menyebutkan **“Penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”**. Namun sepertinya undang-undang tersebut hanya menjadi notulensi dalam kertas. Karena terbukti masih banyak ditemukan perilaku diskriminatif terhadap kaum difabel yang dilakukan masyarakat maupun instansi pemerintah. Permasalahan pelik yang menyelimuti kaum difabel ini harus dibongkar secara integral. Butuh usaha keras dari berbagai kalangan mulai dari masyarakatnya sendiri, politisi, pemerintah, pelaku bisnis dan semuanya. Mari kita ciptakan kemerdekaan bagi kaum difabel. Selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke 65.....semoga menjadi hari Kemerdekaan untuk kita semua.... (Totok Rawi & berbagai Sumber)

MERDEKA

Tak terasa sudah 65 Tahun Indonesia Merdeka, apa arti merdeka disini ialah bebas dari cengkraman penjajah. Semua ini didapat dengan penuh perjuangan dan pengorbanan, para pejuang tidak gentar menghadapi penjajah, dengan gigih dan gagah berani serta semangat pantang menyerah adalah senjata utama untuk merebut kemerdekaan, mereka rela berkorban jiwa raga dan harta benda bahkan nyawa menjadi taruhannya. Semangat patriotisme telah mendarah daging dalam jiwa mereka. Perjuangan dan pengorbanan itu tidaklah sia-sia, karena Negara Indonesia telah berhasil direbut kembali dari tangan penjajah. 350 tahun bukanlah waktu yang sebentar dan betapa menderitannya bangsa kita saat itu jadi bangsa yang tertindas.

Namun atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa kemerdekaan itu bisa kita capai walau dengan berbagai pengorbanan dan selanjutnya di Proklamirkan oleh Bung Karno, Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan disertai pengibaran bendera sangsaka merah putih sebagai symbol Indonesia telah merdeka. Perjuangan para pahlawan itu sekarang adalah tugas kita generasi penerus Bangsa untuk mengisi Kemerdekaan ini dengan sungguh-sungguh. Zaman perjuangan dengan sekarang tentu sangat jauh perbedaannya. Sekarang teknologi semakin berkembang pesat dan canggih. Kita harus pandai-pandai memilih dan memilah dalam menggunakan alat-alat canggih ini. Missal laptop, computer, handpone, jika alat-alat ini disalahgunakan tentu akan berdampak negative, namun bila dipergunakan sesuai dengan fungsinya tentu akan bermanfaat dengan baik dan positif.

Selain itu sumber daya manusia yang juga haus diperbaiki, karena di era kemerdekaan ini masih banyak yang terlena dengan arti kata MERDEKA, bukan berarti bebas dalam segala-galanya. Di Negri ini masih banyak koruptor, nepotisme dan kolusi, masih banyak pejabat yang menerima dan menikmati fasilitas mewah dari pemerintah tanpa harus bersusah payah, banting tulang, bekerja keras, dibandingkan dengan rakyat yang hidup dalam kekurangan, kemiskinan dan jauh dari hidup yang layak. Andai para wakil rakyat ini bisa menjadi wakil yang amanah, melakukan dan mendengarkan aspirasi rakyat, tentu kesenjangan social tidak akan terjadi, kemiskinan sangat identik dengan tindak criminal, karena keadaan yang serba kekurangan menjadikan factor utama semua bentuk kejahatan. Tentunya kita semua mengharapkan hidup yang layak, berkecukupan, aman, tentram dan damai, sesungguhnya Negeri ini sangat makmur seperti syair koes plus " **Tanah Kita Tanah Surga, Tongkat dan kayu jadi tanaman " itu baru unsure dari tanah, yang dari air juga ada " Bukan Lautan hanya Kolam Susu, Kail dan jala cukup menghidupi mu " itu ungkapan-ungkapan yang sangat indah dan bisa kita bayangkan betapa kaya rayanya negri ini.**

Namun sebagai pengelolanya manusia itu sendiri yang tidak baik dalam mengaturnya, sekarang banyak bencana dan musibah melanda dimana-mana dari banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, itu hanya sebagian bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia, yang tidak bisa menjaga tanah air ini. Seharusnya kita bisa belajar dari pengalaman yang sudah terjadi, perbaikan harus mulai dilakukan dari hal-hal yang sangat kecil, mulai dari individu itu sendiri, lingkungan keluarga dan tingkat masyarakat, agar semua bisa diantisipasi, setidaknya mengurangi resiko bencana, harapan terbesar kita adalah agar Negri ini bisa menjadi Negri yang " **Gemah Ripah Loh Jinawi " yang artinya Negri yang Makmur Dan Sentosa, sehingga bisa menjadi kebanggaan dimata kita dan menjadi panutan tuk semua bangsa di dunia, negri yang rakyatnya bisa hidup sejahtera, semoga perbaikan disegala bidang akan segera terealisasikan sehingga semua bisa berjalan dengan seimbang, semua warga negara Indonesia bisa hidup rukun dalam perbedaan suku, agama dan budaya, berbeda-beda tetapi satu juga " Bhineka Tunggal Ika " Merdeka" Sekali Merdeka Tetap Merdeka " (Purwanti)**





KEMERDEKAAN BAGI DIFABEL

Tujuh Belas Agustus Tahun Empat Lima, Itulah Hari Kemerdekaan Kita.....Lagu ini berkumandang setiap HUT RI, lagu yang penuh semangat untuk merasakan kebebasan setelah sekian tahun bahkan sekian abad para pendahulu-pendahulu kita yang tertindas oleh para penjajah, dengan rela mau berkorban demi Nusa dan Bangsa, sampai pada akhirnya cita-cita mereka terwujud, tinggal kita sekarang bagaimana mengisi kemerdekaan di negeri ini.

Sampai saat ini timbul pertanyaan dalam diri segelintir para difabel, sudah betul-betul merdekakah kita, kebebasan yang kita rasakan saat ini terutama untuk difabel, dan memaknai kemerdekaan itu seperti apa dan bagaimana? sehingga difabel merasakan juga arti perjuangan para pahlawan merebut kemerdekaan itu dengan gigih berani dan semangat tinggi, rela berkorban jiwa dan raga untuk Indonesia, dan apa yang dapat difabel perbuat demi kemajuan Negeri tercinta ini.

Kemerdekaan yang kita idam-idamkan itu hanya milik orang - "orang non cacat", kalau orang "cacat" itu akan membuat kekacauan sehingga pembangunan tidak akan berjalan lancar, karena akan membuat lambat dan menghilangkan estetika pembangunan kalau dibuatkan atau dibikinkan ramp (jalan khusus untuk naik dan turun pengguna kursi roda) atau holding gate (fasilitas khusus untuk pengguna kursi roda), difabel bagi sekelompok orang juga tidak dianggap berguna, bahkan jarang diikutsertakan dalam segala kegiatan, sampai saat ini bahkan difabel masih diperlakukan diskriminasi. Pertanyaanya apakah "KEMERDEKAAN" itu hanya milik orang-orang tertentu yang tidak cacat.

Saya berharap di HUT RI yang ke 65 ini adalah hari kemerdekaan untuk para penyandang cacat dalam berkarya dan berprestasi agar bermanfaat untuk diri sendiri, dan harapannya bisa berkarya untuk kemajuan pembangunan negeri tercinta, untuk itu marilah kawan-kawan difabel berkarya dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang kita miliki, siapa lagi yang peduli dengan negeri ini bahkan mungkin kita sudah lupa dengan lagu Indonesia Raya atau lebih ironisnya lagi kita lupa akan warna bendera kita, kita jangan terlalu hanyut dan asyik merenungi diri, berputus asa bahkan frustrasi tidak akan menyelesaikan masalah karena melihat kondisi yang sangat tidak adil menurut pemahaman kita para penyandang cacat dan jangan lupa kalau kita dilahirkan itu untuk berkarya dan berbuat sesuatu yang berguna dalam hidup ini.

Sehingga para pejuang kemerdekaan yang telah gugur atau mendahului kita tidak kecewa melihat negeri ini semakin hancur karena terjajah lagi. Pada hakekatnya Karena kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa dan orang, harapannya kedepan untuk kawan-kawan difabel teruslah berjuang dan berbuatlah sesuatu untuk diri sendiri dan negara ini agar kita para difabel tidak selalu diremehkan dan diperlakukan diskriminatif. (Tasik)



DIFABEL NEWS Menerima Tulisan Atau Artikel Dari Kawan-kawan, Tulisan Bisa Dikirim Melalui Email: totokrawidjati@vmail.com Atau Bisa Langsung Di Alamatkan Ke Redaksi DIFABEL NEWS . Komplek BNI No.25 Jl Madubronto Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta, Telp 0274 384066. Kritik dan Saran Sangat Berarti Bagi perkembangan Dan Perubahan Kita Bersama

MAKNA KEMERDEKAAN DALAM QUR'AN BAGI DIFABEL

KEMERDEKAAN memiliki keanekaragaman makna. Proklamasi 17 Agustus 1945 oleh Soekarno - Hatta secara tidak langsung menerangkan apa makna kemerdekaan bagi tanah air. Ketika Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan tersebut, barangkali apa yang difikirkan oleh sebagian besar rakyat Indonesia ketika itu adalah kemerdekaan daripada penjajahan kuasa asing. Namun, apa makna kemerdekaan itu bagi Difabel kini – yang merupakan tugas kita (difabel) untuk menjawabnya? Secara sepintas lalu, mungkin kita dapat perjelaskan secara mudah: bahawa kemerdekaan adalah pintu gerbang menuju cita-cita yaitu kesetaraan hak dan perlakuan. Sebagai difabel, kita dapat mengutip makna kemerdekaan tersebut daripada al-Quran. Dalam kitab suci ini ditunjukkan pelbagai kisah kemerdekaan orang-orang terdahulu yang dapat mengilhami kita, bagaimana seharusnya menjadi difabel yang merdeka. *Pertama*, makna kemerdekaan dapat dipetik daripada kisah Nabi Ibrahim a.s ketika baginda membebaskan diri daripada orientasi asasi yang keliru dalam kehidupan manusia. Dalam surat al-**An'am ayat 76-79** dikisahkan perjalanan spiritual Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan. Pencarian spiritual tersebut merupakan usaha Nabi Ibrahim dalam membebaskan hidup daripada orientasi kehidupan yang diyakininya keliru, namun hidup subur dalam masyarakatnya. Sebagaimana diketahui, masyarakat yang melingkungi Ibrahim a.s ketika itu menyembah berhala. Bagi Ibrahim a.s, peyembahan terhadap berhala merupakan kesalahan besar kerana secara logiknya pun perbuatan itu membawa manusia kepada perlakuan penghambaan yang menjatuhkan harkat dan martabat diri mereka sendiri sebagai manusia. Begitu saat ini perlakuan diskriminasi terhadap bahwa difabel itu tak berdaya, tidak bisa apa-apa maka harus dikasihani, disantuni, adalah hal yang wajar atau semetinya. Bahkan kita (baca : difabel) sendiri masih ada yang beranggapan itu wajar, karena itulah budaya yang ada di masyarakat. Perlakuan yang sedemikian itu bukan hanya melukai harkat-martabat manusia, malah menghancurkan sendi-sendi kehidupan difabel.

Kedua, makna kemerdekaan juga dapat dipetik daripada kisah Nabi Musa a.s ketika membebaskan bangsanya daripada penindasan Fir'aun. **Kekejaman Fir'aun terhadap Bani Israil dikisahkan dalam beberapa ayat di dalam al-Quran. Fir'aun merupakan "penguasa" yang angkuh dan tamak akan kekuasaan di muka bumi.** Keangkuhan pemimpin atau penguasa seperti ini membuat mereka tidak segan segan membunuh dan memperhambakan kaum lelaki Bani Israil dan menistakan kaum wanitanya. Keangkuhan inilah yang mendorong Musa a.s tergerak memimpin bangsanya untuk membebaskan diri daripada penindasan, dan akhirnya meraih kemerdekaan sebagai bangsa yang mulia dan bermartabat (Al-**A'raaf: 127**, Al-Baqarah: 49, dan Ibrahim: 6) Namun, jangan lupa, berakhirnya

keangkuhan dan penindasan rejim kolonialisme tidak serta merta membebaskan rakyat Indonesia daripada keangkuhan dan penindasan rejim lain dalam bentuk yang berbeda. Seperti diskriminasi kepada kelompok-kelompok marginal (termasuk difabel) dengan merampas hak asasi mereka. Kita memerlukan pemimpin yang sayang dan cinta serta peduli kepada rakyat dan negaranya sendiri. Tidak hanya cinta sebatas di bibir untuk pencitraan pada saat mereka membutuhkan kita, namun juga mencintai dan mewujudkan dalam bentuk dan tindakan yang nyata.

Ketiga, kisah kejayaan Nabi Muhammad s.a.w dalam mewujudkan misi dakwah baginda di muka bumi (Al-**Maa'idah: 3**) menjadi sumber ilham yang tidak pernah putus atau usang bagi kita untuk memaknakan kemerdekaan secara lebih holistik dan integral. Ketika diutus 14 abad silam, Nabi Muhammad s.a.w menghadapi sebuah masyarakat yang mengalami tiga penjajahan sekaligus: kekeliruan hidup (tauhid), penindasan ekonomi, dan kezaliman sosial. *Kekeliruan hidup* diekspresikan dalam penyembahan patung oleh masyarakat Arab Quraisy. Rasulullah berjuang keras mengajar kepada umat manusia untuk menyembah Allah Yang Maha Esa dan **meninggalkan "tuhan-tuhan" yang secara terang-terang** perlakuan itu menjerumuskan harkat dan derajat manusia (Luqman: 13; Yusuf: 108; Az-Dzaariyaat: 56; Al- **Jumu'ah: 2**). *Penindasan ekonomi* itu dilukiskan di dalam al-Quran sebagai sesuatu yang membuat kekayaan hanya berputar dan berlingkar pada kelompok-kelompok tertentu saja (Al-Hasyr: 7). Rasulullah s.a.w mengkritik orang-orang yang mengumpulkan dan menghitung-hitung harta tanpa mempedulikan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi (Al-Humazah: 1-4; Al-**Maa'uun: 2-3**). *Rasulullah s.a.w memperjuangkan pembebasan perbudakan*, kesamaan lelaki dan perempuan, dan persamaan antara manusia.

Dalam khutbah terakhir baginda di Arafah, baginda menegaskan bahawa tidak ada perbezaan antara hitam dengan putih, antara Arab dengan bukan Arab. Semuanya sama di hadapan Allah s.w.t. Tidak ada sisi atau sudut yang membedakan suatu kelompok manusia dengan manusia lainnya, melainkan tingkat ketakwaan mereka kepada Maha Pencipta (Al-Hujuraat: 13). Apa makna kemerdekaan bagi kita? Sebagai difabel seharusnya dapat memetik, dan mengambil makna kemerdekaan tersebut daripada al-Quran. Yaitu kita harus terbebas dari rasa minder, malu dan putus asa serta diskriminasi, kondisi kita saat ini bukan untuk di ratapi atau di sesali namun harus kita maknai dengan berbuat yang terbaik yang dapat kita lakukan. Kita juga harus me-**"merdeka" kan diri kita dari diskriminasi** kelompok-kelompok lain, dengan menghilangkan stigma (anggapan) bahwa difabel itu lemah, tidak bisa apa-apa, harus dikasihani dengan melakukan pemberdayaan diri kita sendiri. (Edy Supriyanto)

Difabel Juga Manusia

Kaum difabel adalah kelompok minoritas di negeri ini. Badan Pusat Statistik (BPS, 2006) menyebut jumlahnya hanya sekitar 10% dari 250 juta total penduduk Indonesia. Wajar jika keberadaan mereka kurang direspons secara positif, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Mereka sering mendapat perlakuan diskriminatif di berbagai aspek kehidupan, entah di bidang pendidikan, politik, sosial, olahraga, budaya dan sebagainya. Tak jarang sebuah keluarga menyembunyikan anggotanya yang difabel, untuk menghindari rasa malu lantaran menganggapnya sebagai aib yang bisa merusak citra keluarga. Pertanyaannya kemudian: apa yang memicu perlakuan diskriminatif itu? Sampai sejauh mana upaya pemerintah memperbaiki martabat kaum difabel? Langkah apa yang harus dilakukan pemerintah untuk melindungi kaum difabel? Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi penting diajukan, pasalnya, kaum difabel adalah warga negara yang suaranya juga turut menyumbang perolehan kursi Parpol ketika Pilkada, Pilgub, Pemilu dan Pilpres. Maka, tidak adil jika sumbangsih dan dukungan suara itu berbalas diskriminasi.

Benar pemerintah sudah mencanangkan Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN, 2000) sebagai penerapan UU No 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Menurut UU ini, kaum difabel harus mendapat perlakuan yang sama layaknya masyarakat normal lainnya. Sayangnya, UU itu belum efektif mengubah nasib kaum difabel. Itu terlihat dengan sikap masyarakat yang masih menganggap kaum difabel sebagai "sampah" yang layak menerima ketidakadilan. Seperti kasus yang dialami atlet penyandang cacat Kabupaten Bandung. Meski mereka turut andil membela mati-matian daerah, tetapi penghargaan yang seharusnya diterima tidak sebanding. Singkatnya, mereka dibedakan dengan atlet normal. Ironis Pada ranah pendidikan tak kalah kejamnya. Jika merujuk UUD 1945, tidak ada pembedaan antara warga negara normal maupun difabel. Asalkan warga negara/penduduk asli, berhak mendapat pendidikan sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Praktiknya, sekolah dan perguruan tinggi (PT) kita justru mempersulit kaum difabel, meski mereka memiliki kecerdasan melebihi orang normal. Pun begitu di ruang publik. Meski pemerintah sudah mendeklarasikan GAUN, tetapi ironisnya akses publik yang ramah bagi kaum difabel (difabel friendly) belum dibangun. Pemerintah beranggapan pembangunan difabel friendly kurang menguntungkan secara ekonomis. Misalnya, kalau setiap ruang publik harus dibuatkan ramp atau lift bagi pemakai kursi roda atau guiding block bagi tunanetra, dana yang dikeluarkan amat banyak.



Lebih ironis, muncul bentuk-bentuk kekerasan sosial baru terhadap kaum difabel di masyarakat. Misalnya, seorang tunanetra ditolak mendaftar ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS), karena panitia tidak menyediakan soal dalam huruf braille. Pemakai kursi roda ditolak mendaftar kuliah karena laboratorium kampus tersebut berada di lantai dua, sementara tidak ada ramp maupun lift. Dinas Tenaga Kerja menolak difabel untuk mengikuti kursus, karena menurut mereka tempat difabel adalah di Dinas Sosial. Dan, banyak lagi bentuk kekerasan yang lain. Fenomena itu, tentu amat menyakitkan. Bukankah kaum difabel juga manusia—yang menjadi cacat karena suratan Tuhan? Sangat tidak adil jika kita semakin menambah panjang daftar deritanya? Tampaknya, kita akan terus menjadi bangsa "pendosa" jika tidak segera mengubah nasib kaum difabel. Masyarakat bawah perlu disadarkan akan pentingnya sensitibilitas dan penghormatan atas hak-hak kaum difabel. Meski minoritas, kaum difabel itu harus diposisikan secara layak sesuai dengan standar normalitas mereka. Standar normalitas itu adalah kriteria yang digunakan untuk memandang atau mengukur kemampuan dan keberhasilan, dari perspektif kaum difabel sendiri. Dengan standar itu, sekecil apapun peran kaum difabel akan kita apresiasikan secara layak dan positif. Tidak kalah pentingnya, kriteria kenyamanan dan standar keselamatan ruang publik bagi kaum difabel harus diutamakan. Mereka merupakan individu lemah yang sangat gampang terkena bahaya. Kepekaan dan solidaritas terhadap kaum difabel memang sebuah keniscayaan. Meski demikian, harus ditempatkan pada kerangka sewajarnya. Solidaritas dan kepekaan yang berlebih, pada gilirannya justru menempatkan kaum difabel pada pribadi yang malas dan manja (karena sudah dikasihani). Sudah saatnya diciptakan kondisi yang membuat kaum difabel enjoy dengan kekurangannya.

Langkah strategis Pemerintah sebagai pemegang kebijakan, harus segera melakukan langkah-langkah strategis guna melindungi kaum difabel. Sebagaimana rekomendasi workshop difabel (2006), maka langkah-langkah strategis itu meliputi: (1) Dimasukkan anggaran untuk kaum difabel (difabel budgeting) dalam APBN/APBD. Anggaran ini digunakan untuk membangun infrastruktur dan ruang publik yang nyaman bagi kaum difabel; (2) Pemerintah dan DPR perlu mengamandemen UU No 4 Tahun 1997 dan peraturan-peraturan turunannya agar lebih mengakomodasi kepentingan difabel; (3) Pemerintah memberikan keterampilan, kesempatan dan pendidikan kepada difabel sesuai dengan minat dan potensinya; (4) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada difabel untuk mendapatkan lapangan kerja sesuai pendidikan, keterampilan, kecakapan, dan minatnya; (5) Pemerintah juga harus melakukan penegakan hukum yang adil jika terjadi kekerasan maupun pelanggaran hak asasi difabel; (6) Pemerintah harus memberikan kemudahan bagi difabel untuk mengakses ruang publik, baik secara fisik maupun nonfisik; (7) Pemerintah perlu memperluas akses informasi dan komunikasi bagi difabel, termasuk informasi berbasis teknologi; (8) Pemerintah secara nasional mestinya mendeklarasikan dan mengimplementasikan gerakan nasional ramah difabel; (9) Menghapuskan pelabelan negatif terhadap difabel serta menerima difabel sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat. Pada akhirnya, kaum difabel harus dipandang sebagaimana individu normal lainnya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Mereka yang punya kelebihan, difasilitasi serta diberi ruang untuk mengekspresikan. Sementara, mereka yang tidak percaya diri harus diberi penyadaran dan dimotivasi agar mensiasati kekurangan yang dimilikinya sebagai sebuah peluang. Semoga. Oleh Agus Wibowo *
dimuat Di harian Solopos Edisi Rabu 03 Desember 2008.

Difabel Dan Kemerdekaan

Seratus tahun sudah, kebangkitan Indonesia. Se-abad sudah, buah "keras kepala" anak-anak muda yang herois kita rasakan. Kini, Indonesia menjadi sebuah bangsa. Semuanya tak lepas dari peran hiruk-pikuk pemuda dan pergulatan orang-orang yang memegang teguh idealisme, tahan banting dan "revolusioner". Kemerdekaan . tentu bukanlah "gelombang dalam cangkir". Erat hubungannya dengan "musim" revolusi yang memang sedang gemuruh sekitar tahun kemerdekaan. Pada tahun 1896 berkobar revolusi nasional untuk pertama kalinya di Filipina yang digerakkan oleh anak muda yang stubborn. Tingginya gunung dan lebarnya hutan ditundukkan. Demi satu tujuan: Filipina merdeka !. Dialah Apolinario Mabini, otak utama dari revolusi Filipina. Mabini adalah satu-satunya orang yang menulis gambaran dengan cemerlang revolusi saat itu, hingga kenapa revolusi bisa gagal? Mabini selalu konsisten, terus melawan penjajahan Amerika, bahkan sempat pula diasingkan ke Guam. Dan yang membuat setiap orang kagum, dia adalah seorang difabel. Kakinya tidak bisa digunakan hingga kemana-manapun musti ditandu. Dia pula salah satu orang yang dikagumi oleh banyak kalangan, setingkat dengan Jose Rizal, tokoh Filipina yang mati muda itu. Jika memang perubahan di Indonesia tak bisa dilepaskan dari gejala yang ada di Asia, maka jelas sudah Mabini yang dikategorikan cacat itu telah memberikan inspirasi bagi bangsa ini untuk menjadi kerumunan yang tegak sebagai "nation-state". Namun aneh, setelah secara resmi Indonesia menjadi negara-bangsa, harapan kemakmuran dan keadilan bagi orang-orang difabel jauh dari menyenangkan. Bahkan lebih dari itu, luput dari kajian dalam perbincangan wacana sosial. Lantas apakah makna bangsa Indonesia bagi Difabel? Ada baiknya bila kita buka kembali, benarkah sumpah pemuda merupakan titik kulminasi perasaan dan pengalaman bersama, atas relitas setiap kebudayaan dan individu yang berbeda-beda?. Adakah kekosongan akibat dominasi kuasa atas konsep "berbangsa satu", "bertanah air satu", dan "berbahasa satu"? Sebuah kekosongan dan dominasi kuasa kepentingan tertentu, sehingga dari sekian perbedaan, ada yang terbelengkelai, tak tarlilbakikan dalam proses tersebut. Jika tidak, lantas kenapa dalam membangun bangsa ini orang-orang difabel tak pernah diberi ruang yang sama, pemenuhan hak yang sama dengan warga negara yang lainnya?. Ataupun sebenarnya negara bangsa ini merupakan produk ideologi "normalisme", sehingga Indonesia merupakan "imagined-normal societies"?.

Dalam altar sejarah, negara bangsa merupakan produk dari sebuah konsep keperkasaan, "kenormalan" dan kekerasan. Awal konsep negara merupakan sebuah kontruksi dari rentetan perang panjang. Perjanjian Westphalia tahun 1648. Perjanjian ini merupakan peralihan dari kekuasaan gereja ke daulat sang raja. Dan perjanjian ini merupakan akomodasi untuk perang yang berdurasi 30 tahun (Giddens, 2000). Dalam setiap perang selalu ada disana tentara, keperkasaan, kelelahan. Kuasa normalisme meresap di sana. Gelombang nasionalisme juga merupakan riak Marthin Luther. Sang komandan besar dalam reformasi Protestan yang merestui pembunuhan bayi-bayi difabel karena dianggap sebagai "titisan setan" (Colin, 1997). Ideologi normal menilai difabel sebagai masalah, sebagai bagian dari "penyakit" dan "patologi sosial". Mereka diobjekkan secara medis, hingga kemudian di "rehabilitasi", selayaknya rumah yang rusak. Panti-asuhan dan pusat rehabilitasi didirikan di mana-mana, dibangun untuk menseterilkan difabel. Mereka selayaknya "orang gila" pada abad pertengahan Eropa, dienyahkan kuasa yang didahului sebuah kuasa diskursus: rasionalitas, yang berwujud legitiimasi klinis/medis (Foucault, 1988).

Lalu medikalisasi pun terjadi di bangsa ini, pertama kali diperkenalkan oleh VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie). Pada Tahun 1621 mulailah dibangun berbagai rumah-rumah kecil khusus untuk pengobatan yang beredar di sekitar benteng-benteng Batavia dimana kuasa sejati ditancapkan. Kuasa medis semakin kuat dan meneguhkan dirinya sejak Tuan Walondo H.W Daendels membenahi sistem dan memperluas rumah-rumah medis bagi militer dengan membentuk jaringan rapi tahun 1808. Hingga tahun 1820, rumah sakit untuk sipil atau stadsverbandhuizen mulai dibuka, lebih jauh lagi di Batavia untuk pertama kalinya stadsverbandhuizen menangani orang yang mengindap usia renta dan difabel. (Scortino, 1996 dalam Peter Boomgard, 1996: 24 -29). Inilah kemudian yang nantinya menjadi panti-panti asuhan, dan SLB (Sekolah Luar Biasa) yang memisahkan difabel dari masyarakat. Normalisme terus berlanjut. Perang dunia kedua (1939-1946) merupakan bukti sejarah. Kegagalan, keperkasaan, kekuatan dan normalisme tampil dalam wajah - wajah para tentara. Dan buah dari normalisme pun terlihat, sekitar 291.557 tentara AS mati, 357.116 tentara Inggris, dan lebih dari 1 juta tentara China hilang. Lebih dari 3 juta tentara Jerman menjadi korban. Belum lagi negara-negara lain, terlebih negara dunia ketiga. Jutaan orang menjadi difabel, bahkan gugur sebagai korban perang yang paling besar sepanjang sejarah umat manusia itu. Bahkan setelah Bom atom diledakkan, ribuan orang binasa, akibat keangkuhan normalisme. Banyak warga negara yang menjadi difabel, bahkan menimbulkan efek kultural yang panjang. Hibakusa, orang-orang yang menjadi difabel karena efek nuklir di Jepang, dijauhi dan terkucilkan. Bahkan anak turun Hibakusa sulit mendapatkan pekerjaan atau pasangan.

Lantas, bagaimana dengan Indonesia sebagai Negara Bangsa? Dalam lintas sejarah, Jendral Sudirman adalah "Mabini Indonesia". Sang Revolusioner, di atas tandu dia memimpin perjuangan. Naik-turun gunung, keluar masuk kampung, demi satu tujuan: kemerdekaan!. Banyak tentara yang kemudian menjadi difabel. Para veteran baik yang terpublik, maupun mereka yang berjuang, tak tercatat secara formal. Namun melekat dalam masing-masing masyarakat lokal. Mereka, tentu saja menjadi bagian dari proses mewujudkan Indonesia menjadi negara bangsa. Akan tetapi, makna negara bangsa itupun kemudian "dibajak" oleh kuasa normalisme. Berbagai atribut kebangsaan tak pernah melibatkan difabel, sebagai bagian untuk dipertimbangkan. Sukarno yang modernis, tergila-gila dengan kerapian, kemegahan. Impian-impian kegagahan tercermin dalam proyek-proyek besar: Monas, Istiqlal, dan halaman luas disediakan untuk tentara-tentara yang gagah. Sukarno adalah Sang megalomanian, optimis pendamba kerapian, pengagum bangunan-bangunan Soviet yang gagah, dan perkasa. Patung-patung monumental bernada misi kegagahan, dan keperkasaan dipasang di banyak sudut kota (Kusno, 2003) Decak normalisme pun bersikulasi, berlanjut pada kekuasaan selanjutnya.

Ke Hal 8



RENUNGAN BULAN AGUSTUS

Sambungan hal 7

Orde Baru dengan Suhartonya pun melanjutkan mimpi-mimpi ini. Terlebih lagi, Orde Baru merupakan era kekuasaan militer yang tentu sangat mendamba akan sebuah kota, dan negara "normal". Demi kepentingan kekuasaan dan suksesnya program-program developmentalisme. Orde Baru secara terang benderang melakukan political surveillance, dan politik tubuh demi kepentingan kuasa. Tubu-tubuh pun ditata, dipisahkan, di-liyan-kan dari orang biasa. Sekolah-sekolah khusus dibangun, dibedakan menurut jenis difabelitas. Sebagaimana istilahnya "Sekolah Luar Biasa" yang sarat dengan kuasa, kehadiran sekolah-sekolah khusus merupakan politik pengontrolan, simplikasi, dan tentu saja pendisiplinan demi sebuah kota/negara yang rapi dalam matrix persepsi "orang-orang normal". SLB ibarat kerangkeng (cage) penyucian agar para difabel bisa bersih dari penyakit atau "aib" yang dideritanya. Agar difabel mempunyai keahlian khusus: menjahit, sol sepatu, pijat berijazah, dst, karena hanya dengan ini mereka dapat menyesuaikan dengan alam "orang normal". Itu berarti SLB merupakan wilayah penertiban, pendisiplinan dan penggodokan untuk orang difabel agar mampu mengikuti kehidupan dengan standar kenormalan. Kenapa demikian, tentu karena mereka merupakan kelompok devian (menyimpang) yang tentu saja musti diluruskan agar sesuai dengan gerak linier developmentalisme. Di Indonesia, kini terdapat 1.084 Sekolah Luar Biasa. Dari jumlah tersebut 680 swasta dan 404 dikelola oleh pemerintah. Sekolah ini berdiri di mana-mana, dengan tipe dan bentuk yang berbeda-beda. Bahkan banyak diantaranya yang berdasarkan bentuk tubuh dan perbedaan kemampuan indera mereka: SLB Tuna Daksa, SLB Tuna Netra, SLB Tuna Rungtu dan seterusnya. Sekolah Luar Biasa mungkin adalah sekolah yang ingin mengeluarkan mereka menjadi "tidak biasa".

Seratus tahun sudah kebangkitan nasional mengiringi semangat Indonesia menjadi bangsa. Satu abad sudah, rakyat Indonesia berusaha menemukan makna dirinya, untuk menjadi bangsa yang bermartabat. Sejarah telah menjadi saksi, bahwa kaum difabel banyak peran dalam proses perjuangan bangsa ini tegak berdiri. Akan tetapi, karena kuasa normalisme proses menjadi bangsa pun kemudian tidak mampu dinikmati semua orang, terutama kaum difabel. Kondisi ini tentu dapat berubah, jika semua kalangan dalam masyarakat menjadikan perjuangan untuk memenuhi kesamaan hak bagi semua warga negara. Terlebih lagi hak kaum difabel yang selama ini terpasung. Bukankah negara-bangsa merupakan sebuah kesepakatan agar hak-hak setiap individu dalam masyarakat terlindungi: hak ekonomi, sosial, budaya politik dan seterusnya. Wallahu A'lam. (Slamet Tohari / Sedang Belajar Di University Of Hawaii at Manoa)

Tak terasa usia kemerdekaan Negara kita Indonesia telah menginjak 65 tahun, banyak sudah pahit manis kenangan yang terukir seiring waktu berjalan. Banyak orang memaknai kemerdekaan dengan berbagai pendapat sesuai kondisi dan permasalahan yang mereka hadapi setiap hari. Seorang kakek yang waktu muda hidup dalam masa penjajahan memandang masyarakat yang lagi sibuk giat melaksanakan gotongroyong dalam menyambut peringatan hari kemerdekaan Negara kita, sambil duduk matanya berkaca-kaca mengenang masa mudanya dulu. Banyak sudah yang terjadi di Negara ini, pejabat banyak yang korupsi, bencana yang datang silih berganti, kemiskinan dan pengangguran yang semakin banyak dan juga penyakit yang aneh-aneh namanya (HIV/AIDS, Flu burung). Kemerdekaan yang diperjuangkan dengan mempertaruhkan harta dan nyawa sekarang banyak anak muda yang hanyut dalam kehidupan liar, mabok-mabokkan, terjerat narkoba, dan banyak berhura-hura. Lain halnya dengan seorang perempuan yang menjadi salah satu korban gempa sebut saja ibu melati, menurutnya sekarang justru lagi berjuang dan belum merdeka. Tiap hari berjuang untuk latihan jalan demi untuk mengalahkan paraparase yang dialaminya, sehingga berharap suatu hari bisa berjalan kembali walaupun disadarinya tidak bisa sesempurna dulu lagi. Dia rajin terapi, berobat dengan cara alternative maupun dokter spesialis.

Ada juga korban gempa lainnya sampai saat ini masih berjuang melawan decubitus yang hampir membuatnya putus asa. Dia sudah bisa mengalahkan rasa rendah diri dan minder membaur dengan masyarakat, mengurangi ketergantungan pada orang lain dengan cara belajar mandiri. Tapi walau begitu dia sekarang mulai semangat lagi berjuang lebih keras lagi untuk mengobati decubitus yang selama ini dideritanya. Khususnya kaum difabel memang banyak yang masih harus diperjuangkan untuk bisa ikut menerima manfaat sebagai warga Negara. Banyak kaum difabel yang tidak mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan hukum, pekerjaan yang sesuai, juga ketinggalan informasi untuk mereka yang tinggal di pelosok desa. Bersyukur sekarang banyak LSM yang berdiri dan banyak pula membantu masyarakat yang membutuhkan sesuai bidang masing-masing tidak ketinggalan untuk kaum difabel. Ternyata masih banyak yang perlu diperjuangkan dalam rangka mengisi kemerdekaan ini. Perjuangan bukan hanya melawan penjajah negara saja, tapi juga melawan penjajah yang lain misalnya; penjajah ekonomi, kebudayaan, hak asasi, kebodohan dan banyak lagi yang lainnya. Marilah sama-sama kita isi kemerdekaan ini dengan melakukan hal-hal yang baik dan berguna untuk orang lain. Semoga kedepan Negara kita mampu menyelesaikan kendala yang terjadi dengan lebih bijaksana. Madetari (Ma-Ta)